



ANALISIS HASIL Survei Kebutuhan Data

<https://lppps.sorong.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SORONG



<https://Sorongkab.bps.go.id>

ANALISIS HASIL Survei Kebutuhan Data

Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2022

ISSN:

Nomor Publikasi:

Katalog: 1399013.9107

Ukuran Buku:

Jumlah Halaman:

Naskah:

BPS Kabupaten Sorong

Penyunting:

BPS Kabupaten Sorong

Desain Kover:

BPS Kabupaten Sorong

Diterbitkan oleh:

© BPS Kabupaten Sorong

Dicetak oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Sorong 2022

Pengarah:

Ratna Megawati Hamida Gusti, S.E, M.P.

Penanggung Jawab:

Ratna Megawati Hamida Gusti S.E, M.P.

Editor:

Rusdiando, S.Si.

Penulis:

Adelia Christine Br Tarigan, S.Tr. Stat

Desain Layout dan Infografis:

Adelia Christine Br Tarigan, S.Tr. Stat

Kata Pengantar

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2022 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2022”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Terima kasih dan selamat membaca.

Aimas, Desember 2022
Kepala BPS Kabupaten Sorong

Ratna M.H. Gusti

<https://Sorongkab.bps.go.id>

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Bab 1 Pendahuluan.....	14
1.1. Latar Belakang	16
1.2. Tujuan dan Manfaat	17
1.3. Landasan Teori	18
1.4. Metodologi	22
1.5. Sistematika Penulisan.....	31
Bab 2 Segmentasi Konsumen.....	34
2.1. Realisasi Pengumpulan Data	36
2.2. Gambaran Umum Konsumen.....	38
2.3. Konsumen Menurut Karakteristik	39
2.4. Konsumen Menurut Pemanfaatan Utama Hasil Kunjungan.....	42
2.5. Konsumen Menurut Jenis Layanan	43
2.6. Konsumen Menurut Fasilitas Utama untuk Memperoleh Layanan BPS	43
2.7. Konsumen menurut Penggunaan Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan	44
Bab 3 Analisis Kepuasan Layanan	46
3.1. Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan	48
3.2. Kepuasan Konsumen Terhadap Akses Data.....	48
3.3. Kepuasan Konsumen Terhadap Sarana dan Prasarana	49
3.4. <i>Gap Analysis</i> Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan BPS	50
3.5. <i>Importance and Performance Analysis (IPA)</i> Terhadap Pelayanan BPS	51
3.6. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Terhadap Pelayanan BPS	54
Bab 4 Analisis Perilaku Anti Korupsi.....	55
4.1. Gap Analysis Kepuasan Konsumen dalam Penerapan Perilaku Anti Korupsi terhadap Pelayanan BPS	57

4.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) terhadap Pelayanan BPS	58
Bab 5 Analisis Kebutuhan Data	59
5.1. Kebutuhan Data menurut Level Data	62
5.2. Kebutuhan Data menurut Periode Data	62
5.3. Kebutuhan Data menurut Ragam Data	63
5.4. Kebutuhan Data menurut Jenis Data	63
5.5. Kebutuhan Data menurut Sumber Data	64
Bab 6 Analisis Kepuasan Kualitas Data.....	66
6.1. Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Data BPS	68
6.2. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap Kualitas Data BPS.....	69
7.1. Kesimpulan.....	72
7.2. Rekomendasi.....	73
Daftar Pustaka	74
Lampiran	76

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Langkah-Langkah Penghitungan IKK.....	28
Tabel 1.2. Nilai Kinerja Unit Pelayanan	30
Tabel 2.1. Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Penggunaan Data BPS Sebagai Rujukan Utama.....	38
Tabel 2.2 Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Kelompok Umur	39
Tabel 2.3 Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Jenis Kelamin	39
Tabel 2.4 Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	40
Tabel 2.5 Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Pekerjaan Utama	40
Tabel 2.6. Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Instansi/Institusi	41
Tabel 2.7 Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Pemanfaatan Hasil Kunjungan.....	42
Tabel 2.8 Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Jenis Layanan yang Digunakan	43
Tabel 2.9 Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Fasilitas Utama yang Digunakan untuk Memperoleh Data BPS.....	43
Tabel 2.10 Persentase Konsumen K/L/OPD Menurut Wilayah PST dan Penggunaan Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan	44
Tabel 3.1 Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Pelayanan Menurut Wilayah PST	48
Tabel 3.2 Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Akses Data BPS Menurut Wilayah PST	48
Tabel 3.3 Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Sarana dan Prasarana Menurut Wilayah PST	49

Tabel 3.4. Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Tingkat Kesesuaian Pelayanan Menurut Atribut Pelayanan	51
Tabel 3.5 Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap Pelayanan BPS Menurut Wilayah PST] ,	54
Tabel 4.1. Tingkat Kepuasan, Tingkat Kepentingan, dan Gap menurut Atribut Pelayanan dalam Penerapan Perilaku Anti Korupsi	57
Tabel 4.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi	58
Tabel 5.1 Persentase Pencarian Data Menurut Wilayah PST dan Level Data	62
Tabel 5.2 Persentase Pencarian Data Menurut Wilayah PST dan Periode Data	62
Tabel 5.3 Persentase Pencarian Data Menurut Wilayah PST dan Ragam Data	63
Tabel 5.4 Persentase Pencarian Data Menurut Wilayah PST dan Ragam Data	63
Tabel 5.5 Pencarian Data Menurut Wilayah PST dan Sumber Data.....	64
Tabel 6.1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap Kualitas Data BPS Menurut Wilayah Penyedia Data.....	69

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Diagram Cartesius <i>Importance and Performance Analysis</i>	26
Gambar 2.1. Persentase Responden menurut Metode Pengumpulan Data.....	38
Gambar 3.1 Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Pelayanan Menurut Atribut Pelayanan	50
Gambar 6.1. Grafik Persentase Kepuasan Konsumen.....	68

Daftar Lampiran

Lampiran 1.	Realisasi Jumlah Responden menurut Wilayah PST dan Metode Pengumpulan Data	79
Lampiran 2.	Persentase Konsumen menurut Wilayah PST dan Jenis Kelamin	81
Lampiran 3.	Kuesioner VKD 2022	Error! Bookmark not defined.

<https://Sorongkab.bps.go.id>

B A B I

PENDAHULUAN

CAKUPAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU



PELAYANAN
PERPUSTAKAAN



REKOMENDASI
KEGIATAN STATISTIK



KONSULTASI STATISTIK

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan serta perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pemantauan pelayanan publik secara berkesinambungan sehingga pelayanan yang diperoleh masyarakat sesuai dengan standar pelayanan serta harapan dan kebutuhan masyarakat.

BPS merupakan instansi penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab di bidang statistik tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi statistik dilakukan dengan menyediakan unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di BPS baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Monitoring pelayanan melalui PST BPS perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan yang diberikan. Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang dilaksanakan BPS untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Sejarah pelaksanaan SKD dimulai tahun 2005 dimana survei ini pertama kali dilaksanakan dan hanya dilakukan di BPS Pusat. Tahun 2008 dilakukan *pilot project* atau uji coba dengan pelaksanaan SKD di BPS Pusat dan lima (5) BPS Provinsi. Secara bertahap dilakukan penambahan wilayah Provinsi sehingga di tahun 2009 dan 2010 SKD dilaksanakan di BPS Pusat dan

sebelas (11) BPS Provinsi. Pelaksanaan SKD di BPS Pusat dan 33 BPS Provinsi dilaksanakan mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Selanjutnya, sejak tahun 2014 pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang pesat, sejak tahun 2019 pengumpulan data SKD dilaksanakan dengan metode CAWI (*Computer Aided Web Interviewing*). Berkaitan dengan kondisi pandemi yang masih terjadi, maka pengumpulan data survei dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan metode *online* sehingga adaptasi dan perubahan pelaksanaan survei senantiasa dilakukan.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan pelaksanaan SKD 2022 secara umum adalah untuk memperoleh bahan evaluasi dari konsumen sebagai instrumen penting peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta memberikan pelayanan yang baik. Tujuan tersebut tercantum dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Secara khusus, tujuan pelaksanaan SKD 2022 sebagai berikut:

1. mengetahui jenis data yang dibutuhkan konsumen;
2. memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan di unit PST pada masing-masing satuan kerja BPS seluruh Indonesia;
3. mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data dan pelayanan BPS;
4. mengetahui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS; dan
5. mengetahui nilai persepsi anti korupsi terhadap pelayanan BPS.

1.3. Landasan Teori

1.3.1. Konsep dan Definisi

- a. BPS adalah Badan Pusat Statistik, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
- b. BPS Pusat adalah instansi vertikal BPS di pusat.
- c. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS di provinsi.
- d. BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS di kabupaten/kota.
- e. Responden adalah objek SKD atau pemberi jawaban atas pertanyaan dalam kuesioner SKD. Responden SKD 2022 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST BPS sejak 1 Januari 2022 sampai periode pelaksanaan pencacahan.
- f. Konsumen adalah pengguna data dan/atau pengguna layanan PST BPS yang menjadi responden SKD.
- g. Orang-data adalah pasangan satu-satu antara setiap konsumen dengan jenis data yang dibutuhkan.
- h. Wilayah nasional adalah gabungan BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota.
- i. Wilayah PST atau unit PST adalah unit pelayanan statistik terpadu di BPS.
- j. Wilayah penyedia data adalah unit kerja BPS yang menerbitkan/menyediakan data.
- k. Ragam data adalah pengelompokan jenis data menurut kedeputian yang ada di BPS Pusat yang meliputi sosial, produksi, distribusi dan jasa, neraca dan analisis statistik, metodologi dan informasi statistik, serta lainnya.
- l. Level data adalah tingkatan data berdasarkan wilayah yang meliputi nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, individu, dan lainnya.
- m. Periode data adalah rentang waktu suatu data dikumpulkan yang meliputi sepuluh tahunan, lima tahunan, tiga tahunan, tahunan, semesteran, triwulan, bulanan, mingguan, harian, dan lainnya.

1.3.2. Pelayanan Statistik Terpadu

Badan Pusat Statistik merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan statistik dasar serta menjadi rujukan informasi bagi statistik secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik, hasil kegiatan sensus dan survei yang telah dilaksanakan harus disampaikan kepada masyarakat. Penyebarluasan data BPS kepada masyarakat menjadi perhatian utama pihak luar, baik oleh instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Oleh sebab itu, penyajian dan penyebarluasan data perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi serta kondisi yang terkini.

Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan pelayanan publik BPS yang didasarkan pada efisiensi dan efektifitas pelayanan dengan memadukan berbagai unit yang tersebar namun berhubungan satu dengan yang lain. Ragam layanan yang tersedia dalam PST adalah layanan perpustakaan, konsultasi data, rekomendasi kegiatan statistik, dan penjualan publikasi/data mikro/peta wilayah kerja statistik.

PST merupakan pintu gerbang penyebarluasan data BPS. Pelayanan yang diberikan melalui unit PST bersifat satu pintu atau disebut sebagai *one gate service*. Keberadaan unit PST diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mencari data dan informasi statistik. Sistem layanan PST terbagi menjadi 2 (dua) yaitu konsumen datang langsung ke PST dan konsumen secara *online* dalam memperoleh pelayanan. Pelayanan tanpa tatap muka atau *online* tersebut antara lain dapat diakses baik melalui website BPS, melalui pst.bps.go.id, aplikasi AllStat BPS (berbasis android dan iOS), telepon, faksimili, *email*, maupun surat.

Dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, cakupan layanan PST meliputi:

- 1) Pelayanan Perpustakaan;
- 2) Pelayanan Konsultasi Statistik melalui media datang langsung;
- 3) Pelayanan Konsultasi Statistik melalui media *online*;
- 4) Pelayanan Penjualan Publikasi melalui media datang langsung;
- 5) Pelayanan Penjualan Publikasi melalui media *online*;
- 6) Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik melalui media datang langsung;
- 7) Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik melalui media *online*; dan
- 8) Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

BPS senantiasa berupaya menyediakan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Di antaranya adalah BPS melakukan penyediaan data yang mudah diperoleh melalui website BPS atau <https://www.bps.go.id>.

1.3.3. Kepuasan Layanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, unsur dalam menilai kepuasan meliputi hal-hal berikut:

a. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

c. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.

d. Biaya/Tarif

Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Rincian biaya dapat diganti dalam bentuk pertanyaan yang lain jika dalam peraturannya biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen).

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

f. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman. Unsur ini dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain jika jenis layanan yang akan dilakukan penilaian berbasis *website*.

g. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Unsur perilaku dapat disesuaikan menjadi bentuk pertanyaan lain jika jenis layanan yang disurvei berbasis *website*.

h. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

i. Sarana dan Prasara

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

1.4. Metodologi

Metodologi yang akan dijabarkan dalam penjelasan berikut dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu metode *sampling*, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

1.4.1. Metode Sampling

SKD 2022 dilaksanakan dengan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2022 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST BPS pada periode Januari 2022 sampai dengan waktu pencacahan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling*, yaitu suatu teknik penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing wilayah PST BPS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan mandiri (kombinasi antara wawancara dengan swacacah) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data dengan metode wawancara langsung kepada responden dan dilanjutkan pengisian mandiri, dilakukan menggunakan moda PAPI (*Pencil and Paper Interview*) yaitu menggunakan kuesioner dalam bentuk *hardcopy*. Penggunaan moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, maupun operasional di lapangan. Sedangkan pengumpulan data secara mandiri oleh responden dilakukan dengan moda CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*), yaitu dalam jaringan/daring (*online*) melalui aplikasi berbasis *website*.

Penerapan metode pencacahan tersebut di setiap PST sebagai berikut:

- a. Di PST BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota:
 - Wawancara dikombinasikan dengan *self enumeration*, berlaku pada unit PST yang menerapkan layanan datang langsung/*offline*. Pada metode pencacahan ini dilakukan wawancara untuk pertanyaan di blok I, dan selanjutnya dilakukan pengisian secara *self enumeration* (khususnya yang terkait persepsi responden).
 - *Self-enumeration* atau swacacah oleh responden sepenuhnya dilakukan untuk pengisian kuesioner secara *online*. Pendataan dengan metode ini seluruh isian dalam kuesioner dilakukan pengisian mandiri oleh konsumen.
- b. Di PST BPS Pusat:
 - *Self-enumeration* secara *online*.

1.4.3. Metode Analisis Data

Analisis terhadap hasil Survei Kebutuhan Data 2022 dilakukan terhadap karakteristik konsumen, kepuasan konsumen terhadap pelayanan, persepsi konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa bentuk analisis deskriptif yang digunakan antara lain: analisis tabulasi silang, analisis kesenjangan (*gap analysis*), *Importance and Performance Analysis* (IPA), *Customer Satisfaction Index* (CSI) atau Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

a) Analisis Tabulasi Silang

Analisis tabulasi silang adalah analisis yang menggunakan tabel untuk menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variabel dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisisnya tabulasi silang

akan memudahkan dalam memahami antara lain profil konsumen, kebutuhan dan ketersediaan data, maupun masalah lain.

b) Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan atau *gap analysis* adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan (tingkat kepentingan) terhadap kinerja (tingkat kepuasan) dari pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan yang bersangkutan. Pada analisis kesenjangan harapan konsumen akan dibandingkan dengan kinerja pelayanan yang diberikan (*delivered*) oleh unit pelayanan. Nilai kesenjangan atau *gap* diperoleh dari selisih antara tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pengguna layanan pada setiap rincian pelayanan. Nilai kesenjangan dapat bernilai positif maupun negatif. *Gap* positif akan diperoleh jika tingkat kepuasan lebih besar dari tingkat kepentingan, dimana semakin besar nilai *gap* maka konsumen semakin puas. Nilai *gap* negatif akan diperoleh apabila tingkat kepuasan lebih kecil dibanding tingkat kepentingan, dimana semakin kecil nilai *gap* negatif konsumen semakin tidak puas.

c) *Importance and Performance Analysis* (IPA)

Metode IPA dikenal pula dengan istilah analisis kuadran (*quadrant analysis*). Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977). Tujuan metode ini adalah untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dengan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa (Brandt, 2000 dan Latu, 2000). IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi tentang faktor-faktor pelayanan yang sangat mempengaruhi kepuasan dan peningkatan pelayanan (*improvement*). IPA telah diterima secara umum dan digunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisis yang memudahkan usulan perbaikan kinerja (Martinez, 2003).

Dalam IPA terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu:

1. Tingkat Kesesuaian

Penghitungan tingkat kesesuaian digunakan untuk mengetahui seberapa besar konsumen merasa puas terhadap kinerja pelayanan. Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan.

Tingkat kesesuaian dihitung menggunakan rumus berikut:

$$TK = \frac{\bar{x}}{\bar{y}} \times 100\%$$

dengan:

TK = tingkat kesesuaian,

\bar{x} = rata-rata tingkat kepuasan,

\bar{y} = rata-rata tingkat kepentingan.

Kriteria penilaian tingkat kesesuaian adalah:

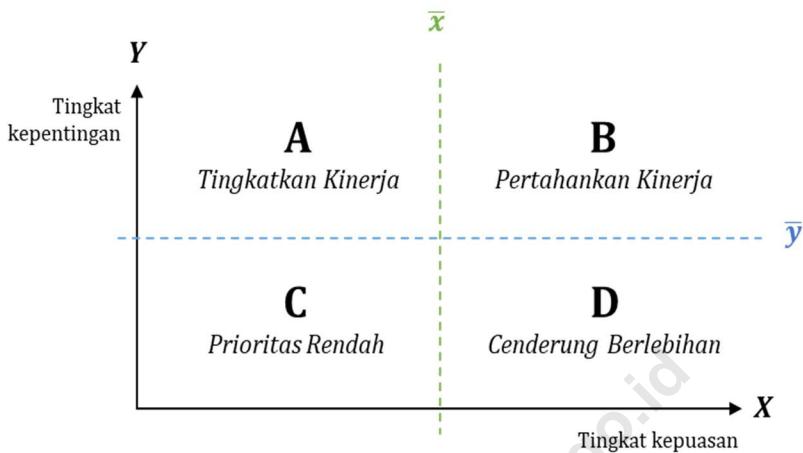
TK > 100% : kinerja pelayanan melebihi harapan konsumen,

TK = 100% : kinerja pelayanan sesuai harapan konsumen,

TK < 100% : kinerja pelayanan belum sesuai harapan konsumen.

2. Diagram Cartesius

Diagram cartesius merupakan analisis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kepuasan (*performance*). Pada Gambar 1.1, diagram cartesius dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik (\bar{x}, \bar{y}) dengan \bar{x} adalah rata-rata tingkat kepuasan dan \bar{y} adalah rata-rata tingkat kepentingan.



Gambar 1.1. Diagram Cartesius *Importance and Performance Analysis*

Masing-masing kuadran yang terbentuk memiliki makna yang berbeda, yaitu:

- Kuadran A (*high importance and low performance*)

Kuadran A terletak di sebelah kiri atas atau kuadran “Tingkatkan Kinerja” yang mempunyai arti prioritas utama dari unit pelayanan ini adalah peningkatan kinerja (*performance improvement*). Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap penting oleh pengguna layanan, tetapi pada kenyataannya kinerja atribut pelayanan tersebut belum sesuai dengan harapan para pengguna layanan. Kinerja atribut pelayanan tersebut lebih rendah dari harapan pengguna layanan terhadap atribut pelayanan tersebut.

Atribut pelayanan yang terdapat dalam kuadran ini harus lebih ditingkatkan agar dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan/pengguna layanan. Cara yang dapat dilakukan adalah perbaikan secara terus menerus terhadap kinerja, sehingga *performance* dari atribut pelayanan yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.

- Kuadran B (*high importance and high performance*)

Kuadran B atau Kuadran “Pertahankan Kinerja” terletak di sebelah kanan atas, yang memiliki arti bahwa kinerja sudah dapat memenuhi harapan pengguna layanan dan diusahakan untuk mempertahankan kinerja tersebut. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap penting oleh pengguna layanan dan kinerja atribut pelayanan dianggap sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh pengguna layanan, sehingga tingkat kepuasannya relatif tinggi. Atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan.

- Kuadran C (*low importance and low performance*)

Kuadran C terletak di sebelah kiri bawah atau disebut sebagai Kuadran “Prioritas Rendah”. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap kurang penting oleh pengguna layanan dan pada kenyataannya kinerja atribut pelayanan tersebut tidak terlalu istimewa.

Peningkatan kinerja atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pemangku kepentingan/pengguna layanan sangat kecil.

- Kuadran D

Kuadran “Cenderung Berlebihan” terletak di sebelah kanan bawah mempunyai arti kinerja yang berlebihan sementara pengguna layanan menganggap kurang penting. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap kurang penting oleh pemangku kepentingan/pengguna layanan. Atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar satuan kerja pemilik indeks dapat melakukan penghematan sumber daya.

d) Persentase Konsumen yang Puas

Salah satu penyajian indikator kepuasan konsumen pada analisis hasil SKD 2022 adalah persentase konsumen yang puas terhadap pelayanan dan aspek kualitas data BPS. Dari sisi pelayanan PST, indikator ini dihitung dari Blok 2 VKD22, yang mencakup persentase konsumen yang puas terhadap pelayanan PST BPS, akses data BPS, serta sarana dan prasarana PST BPS. Sedangkan dari sisi aspek kualitas data, indikator ini mencakup persentase konsumen yang puas terhadap kelengkapan data, akurasi data, dan kemutakhiran data.

Skala pengukuran yang digunakan pada SKD 2022 adalah 1 – 10, dimana konsumen dikatakan puas jika menjawab nilai kepuasan diatas 7,66. Hal ini didasarkan pada pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, dimana dalam skala 10, jika nilai kepuasan diatas 7,66 maka termasuk kategori kinerja yang baik (Tabel 1.2).

e) Indeks Kepuasan Konsumen

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) atau *Customer Satisfaction Index* (CSI) merupakan ukuran untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS dan kualitas data yang dihasilkan oleh unit penghasil data BPS. Dengan demikian, ada 2 (dua) aspek IKK yang dihitung dalam SKD 2022 yaitu IKK terhadap pelayanan PST BPS dan IKK terhadap kualitas data BPS.

IKK terhadap pelayanan PST BPS diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 11 atribut pertanyaan (variabel) yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD21. IKK terhadap kualitas data diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 3 aspek kualitas data, yaitu kelengkapan, akurasi, dan kemutakhiran data. Adapun langkah-langkah penghitungan IKK tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Langkah-Langkah Penghitungan IKK

Langkah (1)	IKK Pelayanan PST (2)	IKK Kualitas Data (3)
----------------	--------------------------	--------------------------

<p>1. Menghitung Penimbang</p>	<p>Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut pelayanan dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut pelayanan.</p> <p>Rumus penimbang:</p> $w_i = \frac{\bar{y}_i}{\sum_{i=1}^{11} \bar{y}_i}$ <p>dengan:</p> <p>w_i = penimbang atribut pelayanan ke-i, $\sum_{i=1}^{11} w_i = 1$</p> <p>\bar{y}_i = rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan ke-i $i = 1, 2, \dots, 11$</p>	<p>Tingkat kepentingan terhadap masing-masing aspek kualitas data diasumsikan sama, yaitu skala maksimum penilaian sebesar 10.</p> <p>Oleh karena itu, nilai penimbang pada IKK kualitas data menjadi konstan, yaitu</p> $w = \frac{y}{\sum_{i=1}^3 \bar{y}_i} = \frac{10}{30}$ <p>dengan</p> $\sum_{i=1}^3 w_i = 1$
<p>2. Menghitung Rata-Rata Tertimbang Skor Kepuasan (IKK')</p>	<p>IKK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 11 atribut pelayanan.</p> <p>Rumus IKK':</p> $IKK' = \frac{\sum_{i=1}^{11} w_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^{11} w_i} = \sum_{i=1}^{11} w_i \bar{x}_i$ <p>dengan:</p> <p>\bar{x}_i = rata-rata tingkat kepuasan atribut pelayanan ke-i</p>	<p>IKK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 3 aspek kualitas data.</p> <p>Rumus IKK':</p> $IKK' = \frac{\sum_{i=1}^3 w \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^3 w_i} = \sum_{i=1}^3 \frac{10}{30} \bar{x}_i$ <p>dengan:</p> <p>\bar{x}_i = rata-rata tingkat kepuasan aspek kualitas data ke-i</p>
<p>3. Menghitung IKK</p>	<p>Penghitungan IKK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen. IKK merupakan hasil konversi nilai IKK' menggunakan rumus berikut:</p> $IKK = \frac{IKK'}{Skala \ maksimum \ penilaian} \times 100 = \frac{IKK'}{10} \times 100$ <p>Nilai IKK diklasifikasikan menjadi 4 kategori seperti pada Tabel 1.2.</p>	

Nilai IKK berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik, dikategorikan menjadi 4 kategori sebagaimana dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Nilai Kinerja Unit Pelayanan

Nilai		Kinerja Unit Pelayanan
(1)	(2)	
25,00 - 64,99		Tidak baik
65,00 - 76,60		Kurang baik
76,61 - 88,30		Baik
88,31 - 100,00		Sangat Baik

Sumber: PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

f) Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS. Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 4 (empat) atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2022.

Langkah-langkah penghitungan IPAK adalah sebagai berikut:

1. Menghitung penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut anti korupsi dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut anti korupsi.

Rumus penimbang:

$$w_i = \frac{\bar{y}_i}{\sum_{i=1}^4 \bar{y}_i} \times 100\%$$

dengan:

$$w_i = \text{penimbang atribut pelayanan ke-}i, \sum_{i=1}^4 w_i = 1$$

\bar{y}_i = rata-rata tingkat kepentingan atribut anti korupsi ke-i
i = 1,2,3,4

2. Menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan (IPAK')

IPAK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 4 (empat) atribut anti korupsi.

Rumus IPAK' :

$$IPAK' = \frac{\sum_{i=1}^4 w_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^4 w_i} = \sum_{i=1}^4 w_i \bar{x}_i$$

dengan:

\bar{x}_i = rata-rata tingkat kepuasan atribut anti korupsi ke-i.

3. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi. IPAK merupakan hasil konversi nilai IPAK' menggunakan rumus berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK'}{skala maksimum penilaian} \times 100 = \frac{IPAK'}{10} \times 100$$

Nilai IPAK semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan dengan sangat baik pada PST BPS.

1.5. Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan dan manfaat, landasan teori, metodologi, sistematika penulisan, serta realisasi pengumpulan data SKD 2022

Bab 2 Segmentasi Konsumen, berisi analisis mengenai karakteristik konsumen di PST BPS Pusat yang menjadi responden SKD 2022 berdasarkan Blok I VKD22

Bab 3 Analisis Kepuasan Layanan, berisi analisis mengenai kepuasan terhadap layanan di PST BPS Pusat berdasarkan Blok II VKD22

Bab 4 Analisis Perilaku Anti Korupsi, berisi analisis mengenai persepsi terhadap perilaku anti korupsi pada layanan di PST BPS Pusat berdasarkan Blok II VKD22

Bab 5 Analisis Kebutuhan Data, berisi analisis mengenai data di PST BPS Pusat yang dibutuhkan oleh konsumen berdasarkan Blok III VKD21.

Bab 6 Analisis Kepuasan Kualitas Data, berisi analisis mengenai kepuasan terhadap kualitas data di PST BPS Pusat yang didapatkan oleh konsumen berdasarkan Blok III VKD22

Bab 7 Penutup, berisi kesimpulan hasil SKD 2022 serta saran terhadap pelaksanaan SKD 2022 serta rekomendasi perbaikan pelayanan di PST BPS Pusat.

<https://Sorongkab.bps.go.id>

SEGMENTASI KONSUMEN

KARAKTERISTIK UTAMA KONSUMEN DATA:



Pendidikan

D-IV/S-1

44,74



Pekerjaan

PNS/TNI/POLRI

44,74



**Instansi
Pemerintah
Daerah**

39,47



**Pemanfaatan
Pemerintahan**

57,89

Bab 2

Segmentasi Konsumen

Bab ini menjelaskan analisis mengenai segmentasi konsumen di PST BPS Kabupaten Sorong. Segmentasi tersebut meliputi karakteristik konsumen dan penggunaan layanan di BPS Kabupaten Sorong. Unit analisis yang digunakan adalah konsumen dengan satuan orang.

2.1. Realisasi Pengumpulan Data

Masing-masing PST BPS memiliki target jumlah responden yang harus dipenuhi pada pelaksanaan SKD 2022. Pada PST BPS Kabupaten/Kota ditargetkan memperoleh sebanyak 30 responden, dan untuk PST BPS Provinsi target jumlah responden adalah 70 responden. Target jumlah responden yang paling tinggi adalah PST BPS Pusat dimana memiliki jumlah target 150 responden.

Pelaksanaan SKD 2022 secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah sebesar 18.227 responden dari total target responden sebanyak 17.200. Hal ini menunjukkan pencapaian realisasi adalah sebesar 105,97 persen untuk seluruh PST penyelenggara SKD 2022. Pencapaian target pengumpulan SKD 2022 secara keseluruhan terpenuhi baik di BPS Pusat, BPS Provinsi, serta BPS Kabupaten Kota, dimana minimal responden yang diperoleh adalah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan metode pengumpulan data pada seluruh PST penyelenggara SKD metode CAWI lebih banyak digunakan, pada seluruh penyelenggara PST. Hal ini terkait dengan kondisi adaptasi kebiasaan baru

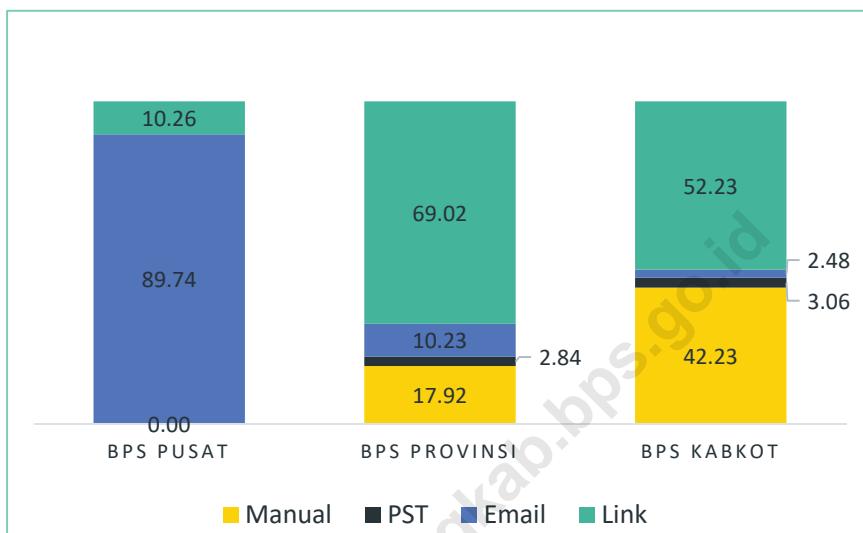
yang diantaranya termasuk pemberian pelayanan secara *daring* atau *online*. Secara rinci pengumpulan SKD terbagi menjadi 4 metode, yaitu:

1. Wawancara kepada responden yang datang untuk kemudian dilakukan input oleh petugas (atau disebut manual).
2. Responden yang datang langsung melakukan pengisian mandiri pada *device* atau komputer yang terdapat di masing-masing PST (atau disebut PST).
3. Responden yang mengisi survei secara mandiri melalui *link* pengisian yang dikirimkan melalui *e-mail* (atau disebut *e-mail*).
4. Responden yang mengisi survei secara mandiri melalui *link* yang ditujukan kepada publik, baik melalui link yang didapatkan dari *website* maupun media lain (selanjutnya disebut *link*).

Metode pengumpulan SKD 2022 secara nasional didominasi dengan metode *link* atau sebesar 54,36 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengumpulan data melalui CAWI sudah mulai familiar digunakan mengingat tingginya persentase responden yang mengisi melalui metode ini. Meskipun demikian metode pengentrian secara manual masih banyak digunakan yaitu sebanyak 38,28 persen. Metode ini dilaksanakan salah satunya pada PST yang masih melakukan pelayanan secara *offline*, serta pada wilayah yang mempunyai kendala terkait jaringan maupun sinyal jika dilakukan secara CAWI.

Jika dilihat berdasarkan wilayah PST penyelenggara SKD, untuk BPS Pusat dikarenakan selama periode pencacahan tidak terdapat pelayanan secara online, semua responden melaksanakan survei secara mandiri dan *online* baik mengisi melalui *e-mail* yang dikirimkan maupun *link* yang diperoleh dari *website* maupun lainnya. Responden yang mengisi melalui *e-mail* yang dikirimkan adalah sebanyak 89,74 persen dan responden yang mengisi melalui *online link* adalah sebesar 10,26 persen. Hal tersebut tidak sejalan jika dibandingkan dengan metode pengumpulan untuk PST BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota dimana responden yang mengisi melalui *online*

link merupakan metode paling banyak digunakan atau secara berturut-turut sebesar 69,00 persen dan 52,31 persen.



Gambar 2.1. Persentase Responden menurut Metode Pengumpulan Data

2.2. Gambaran Umum Konsumen

Data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh BPS, baik yang diperoleh dari sensus, survei, maupun kompilasi produk administrasi, sangat diminati oleh para konsumen. Data dan informasi tersebut dimanfaatkan oleh konsumen untuk berbagai kebutuhan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPS dalam menyajikan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir.

Tabel 2.1. Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Penggunaan Data BPS Sebagai Rujukan Utama

Kode Daerah	Nama Daerah	Jumlah	Sebagai Rujukan Utama (%)	Bukan Rujukan Utama (%)
9107	SORONG	38	73.68	26.32

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum, responden SKD menggunakan data BPS sebagai rujukan utamanya.

2.3. Konsumen Menurut Karakteristik

Pada bagian ini, dibahas mengenai segmentasi konsumen menurut karakteristiknya. Karakteristik konsumen yang dianalisis dibagi menjadi lima, yaitu kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir yang ditamatkan, pekerjaan utama, dan instansi/institusi.

Kelompok Umur

Tabel 2.2 Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Kelompok Umur

Kode Daerah	Nama Daerah	Jumlah Konsumen	< 16thn (%)	16thn - 25thn (%)	26thn - 35thn (%)
9107	SORONG	38	0	36.84	15.79
Kode Daerah	Nama Daerah	Jumlah Konsumen	36thn - 45thn (%)	46thn - 55thn (%)	> 56thn (%)
9107	SORONG	38	28.95	18.42	0

Berdasarkan Tabel 2.2, konsumen di PST BPS Kabupaten Sorong didominasi oleh konsumen berumur 16-55 tahun yang terbagi menjadi empat kelompok umur. Konsumen terbanyak adalah konsumen berumur 16-25 tahun (36,84%), disusul konsumen berumur 36-45 tahun (28,95%), konsumen berumur 26-35 tahun (15,79%), dan konsumen berumur 46-55 tahun (18,42%). Dominasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor usia produktif (15-64 tahun), yaitu orang yang masih dapat belajar dan bekerja dengan baik untuk menghasilkan produk atau jasa.

Jenis Kelamin

Tabel 2.3 Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Jenis Kelamin

Kode Daerah	Nama Daerah	Jumlah (orang)	Laki Laki (%)	Perempuan (%)
9107	SORONG	38	60.53	39.47

Tabel 2.3 menunjukkan persentase konsumen di PST BPS Kabupaten Sorong menurut jenis kelamin. Konsumen di PST BPS Kabupaten Sorong didominasi oleh perempuan. Persentase Konsumen perempuan di PST BPS Kabupaten Sorong adalah sebesar 60,53%. Sementara itu, 39,47% konsumen di PST BPS Kabupaten Sorong adalah laki-laki.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tabel 2.4 Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Kode Daerah	Nama Daerah	Jumlah	Kurang dari atau sama dengan SLTA/Sederajat (%)	D1/D2 /D3 (%)	D4/S1 (%)	S2 (%)	S3 (%)
9107	SORONG	38	31.58	5.26	44.74	15.79	2.63

Karakteristik konsumen menurut tingkat pendidikan penting diketahui. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, konsumen akan semakin melek data. Pada SKD 2022, karakteristik konsumen menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan dikelompokkan menjadi lima, yaitu \leq SLTA/sederajat, D1/D2/D3, D4/S1, S2, dan S3. Dari tabel 2.4, diketahui bahwa konsumen dengan pendidikan tertinggi terbanyak ada pada kategori pendidikan D4/S1 sebanyak 44,74 persen disusul responden dengan pendidikan kurang dari atau sama dengan SLTA sederajat sebanyak 31,58 persen.

Pekerjaan Utama

Tabel 2.5 Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Pekerjaan Utama

Kode Daerah	Nama Daerah	Jumlah (orang)	Pelajar/Mahasiswa (%)	PNS/TNI/Polri (%)	Pegawai Swasta (%)	Wira-swasta (%)	Pekerjaan Utama Lainnya (%)
9107	SORONG	38	28.95	60.53	5.26	5.26	0

Pada SKD 20202 pekerjaan utama dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu pelajar/mahasiswa, peneliti/dosen, PNS/TNI/Polri, pegawai BUMN/D,

pegawai swasta, wiraswasta, dan lainnya. Pekerjaan utama yang dicakup dalam SKD 2022 adalah pekerjaan utama konsumen pada saat pencacahan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil kunjungan yang dilakukan oleh konsumen tersebut.

Berdasarkan Tabel 2.5, sebagian besar konsumen di PST BPS Kabupaten Sorong adalah PNS/TNI/Polri (60,53%). Selanjutnya disusul dengan kategori pekerjaan Pelajar/Mahasiswa sebesar 28,95%. Adapun konsumen dengan pekerjaan utama sebagai pegawai swasta dan wiraswasta masing-masing sebesar 5,26 persen.

Instansi/Institusi

Tabel 2.6. Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Instansi/Institusi

Kode Daerah	Nama Daerah	Jumlah	Lembaga Negara (%)	Kementerian & Lembaga Pemerintah (%)	Pemerintah Daerah (%)	Lembaga Penelitian & Pendidikan Dalam Negeri (%)
9107	SORONG	38	2.63	5.26	39.47	36.84
Kode Daerah	Nama Daerah	Jumlah	Swasta (%)	Lainnya (%)	Lembaga Internasional, Lembaga Penelitian & Pendidikan Luar Negeri (%)	
9107	SORONG	38	5.26	10.53	0	

Konsumen pada SKD 2022 dapat dipilah menurut instansi/institusi tempat pekerjaan utama. Berdasarkan Tabel 2.6, sebagian besar konsumen di PST BPS Kabupaten Sorong berasal dari Pemerintah Daerah (39,47%). Hal ini sejalan dengan dominasi konsumen dengan pekerjaan utama berupa PNS/TNI/POLRI. Posisi kedua adalah konsumen yang berasal dari Lembaga Penelitian dan Pendidikan dalam Negeri sebesar 36,84%. Selanjutnya adalah konsumen yang berasal dari Lembaga Lainnya sebesar 10,53 persen.

2.4. Konsumen Menurut Pemanfaatan Utama Hasil Kunjungan

Tabel 2.7 Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Pemanfaatan Hasil Kunjungan

Kode Daerah	Nama Daerah	Tugas Sekolah/Tugas Kuliah (%)	Pemerintahan (%)	Komersial (%)	Penelitian (%)	Pemanfaatan Lainnya(%)
9107	SORONG	34.21	57.89	2.63	2.63	2.63

Pemanfaatan utama hasil kunjungan ke PST BPS Kabupaten Sorong menggambarkan tujuan utama pencarian atau konsultasi data yang dilakukan oleh konsumen di PST BPS Kabupaten Sorong. Dalam SKD 2022, pemanfaatan utama dikelompokkan menjadi lima, yaitu Tugas Sekolah/Tugas Kuliah, Pemerintahan, Komersial, Penelitian, dan Lainnya. Sebagaimana terdapat pada Tabel 2.7 hasil SKD 2022 menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil kunjungan, baik kunjungan langsung maupun tidak langsung, ke PST BPS Kabupaten Sorong cukup bervariasi. Walaupun demikian, hasil kunjungan ke PST BPS Kabupaten Sorong paling banyak dimanfaatkan untuk Pemerintahan (43,33%). Pemanfaatan untuk Tugas Sekolah/Tugas Kuliah serta penelitian menempati posisi kedua dengan persentase sebesar 22,72%. Sementara itu, pemanfaatan hasil kunjungan paling sedikit adalah untuk kegiatan Komersial, Penelitian dan pemanfaatan lainnya masing-masing sebesar 2,63%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil kunjungan ke PST BPS Kabupaten Sorong sangat dibutuhkan dalam bidang penelitian dan perencanaan.

2.5. Konsumen Menurut Jenis Layanan

Tabel 2.8 Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Jenis Layanan yang Digunakan

Kode Daerah	Nama Daerah	Perpustakaan (%)	Akses Produk Statistik Pada Website BPS(%)	Konsultasi Statistik(%)	Lainnya (%)
9107	SORONG	9.09	77.27	13.64	0

Sesuai dengan peran BPS sebagai lembaga publik, BPS menyediakan berbagai jenis layanan data dan konsultasi statistik. Layanan tersebut meliputi Pustaka Tercetak, Akses Produk Statistik pada Website BPS,, Penjualan Publikasi, Data Mikro, Konsultasi Data Statistik, dan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

Distribusi penggunaan jenis layanan di PST BPS Kabupaten Sorong oleh konsumen dapat dilihat pada Gambar 2.8. Berdasarkan gambar tersebut, jenis layanan yang paling banyak digunakan oleh konsumen Akses Produk Statistik Pada Website BPS, yaitu sebesar 77,27%. Pada posisi kedua, Konsultasi Data Statistik dengan persentase sebesar 13,64%.

2.6. Konsumen Menurut Fasilitas Utama untuk Memperoleh Layanan BPS

Tabel 2.9 Persentase Konsumen Menurut Wilayah PST dan Fasilitas Utama yang Digunakan untuk Memperoleh Data BPS

Kode Daerah	Nama Daerah	Jumlah (orang)	Datang Langsung ke PST (%)	Website BPS /Allstats BPS (%)	Surat/ Email (%)	Aplikasi Chat(%)	Fasilitas Lainnya (%)
9107	SORONG	38	41.67	20.83	14.58	22.92	0

Fasilitas utama yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS juga ditanyakan kepada konsumen yang menjadi responden SKD 2022. Fasilitas

tersebut meliputi Website BPS & Allstat BPS (aplikasi android dan iOS), aplikasi chat, Surat/Email, datang langsung ke PST, dan lainnya.

Berdasarkan Tabel 2.9, dapat dilihat bahwa sebagian besar konsumen di PST Kabupaten Sorong mendapatkan data dengan cara Datang Langsung ke PST yaitu sebesar 41,67%. Hal ini karena pengguna data BPS Kabupaten Sorong masih kurang mahir memanfaatkan fitur pada website BPS. Walaupun demikian, masih ada konsumen yang menggunakan fasilitas website BPS dengan persentase 20,83%. Selain itu, terdapat juga 22,92% responden yang menggunakan fasilitas berupa aplikasi chat.

2.7. Konsumen menurut Penggunaan Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan

Tabel 2.10 Persentase Konsumen K/L/OPD Menurut Wilayah PST dan Penggunaan Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan

Kode Daerah	Nama Daerah	Menggunakan Data BPS untuk Perencanaan dan Monev (%)
9107	SORONG	100

Berdasarkan tabel 2.10, diketahui bahwa seluruh konsumen yang berasal dari Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah di Kabupaten Sorong menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.

<https://Sorongkab.bps.go.id>

B A B I I I

ANALISIS KEPUASAN LAYANAN

KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP



Pelayanan
99.21



Akses
97.37



**Saranan dan
Prasarana**
97.37



IKK
Indeks Kepuasan Konsumen
93.16

Bab 3

Analisis Kepuasan Layanan

Bab ini menjelaskan analisis mengenai kepuasan konsumen di PST BPS Kabupaten Sorong terhadap pelayanan PST BPS Kabupaten Sorong secara umum dan menurut atribut pelayanan. Analisis kepuasan layanan meliputi kepuasan konsumen terhadap pelayanan, akses, dan sarana prasarana, *gap analysis*, *Importance and Performance Analysis* (IPA), serta analisis Indeks Kepuasan Konsumen (IKK). Unit analisis yang digunakan adalah konsumen dengan satuan orang.

3.1. Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan

Tabel 3.1 Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Pelayanan Menurut Wilayah PST

Kode Daerah	Nama Daerah	Puas (%)
9107	SORONG	99.21

Keberhasilan pelayanan BPS dapat diukur dengan persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan BPS. Berdasarkan Tabel 3.1, persentase konsumen yang merasa puas dengan pelayanan BPS di PST BPS Kabupaten Sorong sebesar 99,21%.

3.2. Kepuasan Konsumen Terhadap Akses Data

Tabel 3.2 Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Akses Data BPS Menurut Wilayah PST

Kode Daerah	Nama Daerah	Puas (%)
9107	SORONG	97.37

Kepuasan konsumen terhadap akses data BPS diperoleh dari atribut akses data BPS melalui fasilitas utama yang digunakan (sesuai Blok 1 Rincian 11), akses data pada website BPS, dan akses konten pada website BPS.

Berdasarkan Tabel 3.2, persentase konsumen di PST BPS Kabupaten Sorong yang puas terhadap akses data sebesar 97,37%, sedangkan 2.63% konsumen di PST BPS Kabupaten Sorong merasa tidak puas dengan akses data.

3.3. Kepuasan Konsumen Terhadap Sarana dan Prasarana

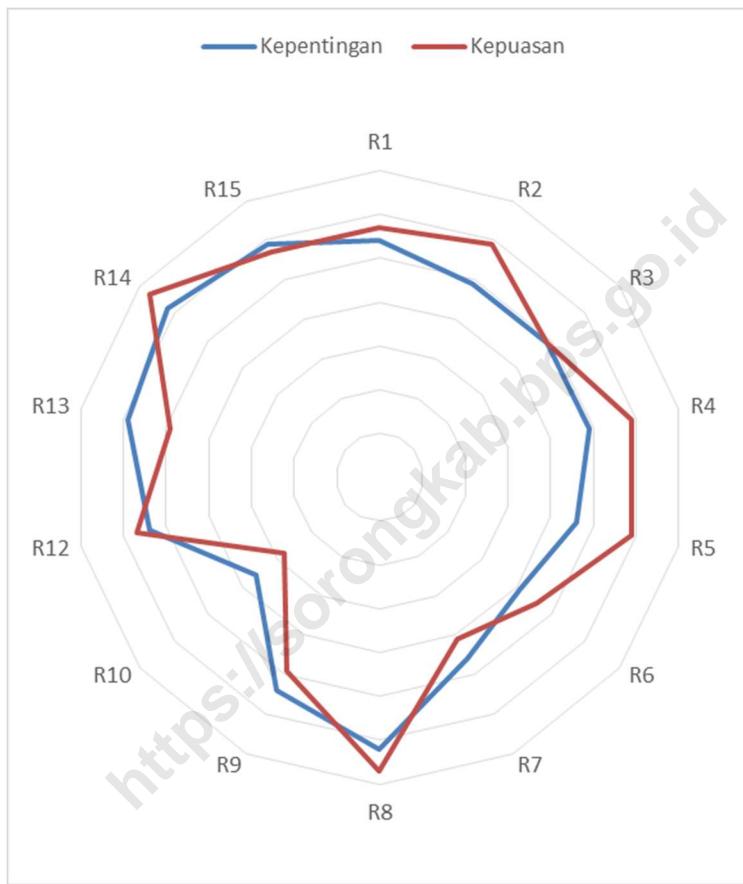
Tabel 3.3 Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Sarana dan Prasarana Menurut Wilayah PST

Kode Daerah	Nama Daerah	Puas (%)
9107	SORONG	97.37

Kepuasan konsumen terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS dapat diperoleh dari atribut kenyamanan sarana dan prasarana serta keberadaan fasilitas pengaduan. Berdasarkan Tabel 3.3, persentase konsumen di PST BPS Kabupaten Sorong yang puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana sebesar 97,37% sedangkan 2,63% konsumen di PST BPS Kabupaten Sorong merasa tidak puas dengan pemenuhan sarana dan prasarana.

3.4. Gap Analysis Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan BPS

Gambar 3.1 Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Pelayanan Menurut Atribut Pelayanan



Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa ada beberapa aspek pelayanan yang memiliki *gap* negatif, artinya nilai harapan (kepentingan) lebih tinggi daripada nilai persepsi (kepuasan). Namun, ada pula beberapa aspek yang memiliki *gap* positif. Artinya, nilai persepsi lebih tinggi dari pada nilai harapan. Selain itu, ada pula aspek yang tidak memiliki *gap* antara nilai harapan dan persepsinya. Artinya nilai persepsi sama dengan nilai yang diharapkan konsumen.

Gap antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan untuk masing-masing atribut pelayanan ini dapat dilihat pada tabel 3.4. Berdasarkan tabel tersebut,

atribut yang memiliki *gap* terbesar adalah Kemudahan Fasilitas Pelayanan dengan *gap* sebesar -0,08. Artinya, kinerja dalam aspek ini masih cukup jauh tertinggal dari harapan konsumen atau konsumen masih merasa kesulitan dalam menemukan Fasiliias Pengaduan di PST BPS Kabupaten Sorong. Meskipun demikian, menurut Parasuraman (2001), jika *gap* negatif bernilai lebih besar dari -1, maka atribut pelayanan tersebut masih bisa dikatakan berada dalam kategori baik.

3.5. *Importance and Performance Analysis (IPA)* Terhadap Pelayanan BPS

Bagian ini menganalisis kepuasan konsumen terhadap pelayanan BPS dalam rangka menentukan prioritas perbaikan kinerja pelayanan di PST BPS Kabupaten Sorong. IPA menganalisis tingkat kesesuaian dengan membandingkan tingkat kepuasan dengan tingkat kepentingan. Selanjutnya, IPA memetakan atribut pelayanan ke dalam empat kuadran yang dipisahkan oleh rata-rata tingkat kepentingan (harapan) pada sumbu Y dan rata-rata tingkat kepuasan (kinerja) pada sumbu X.

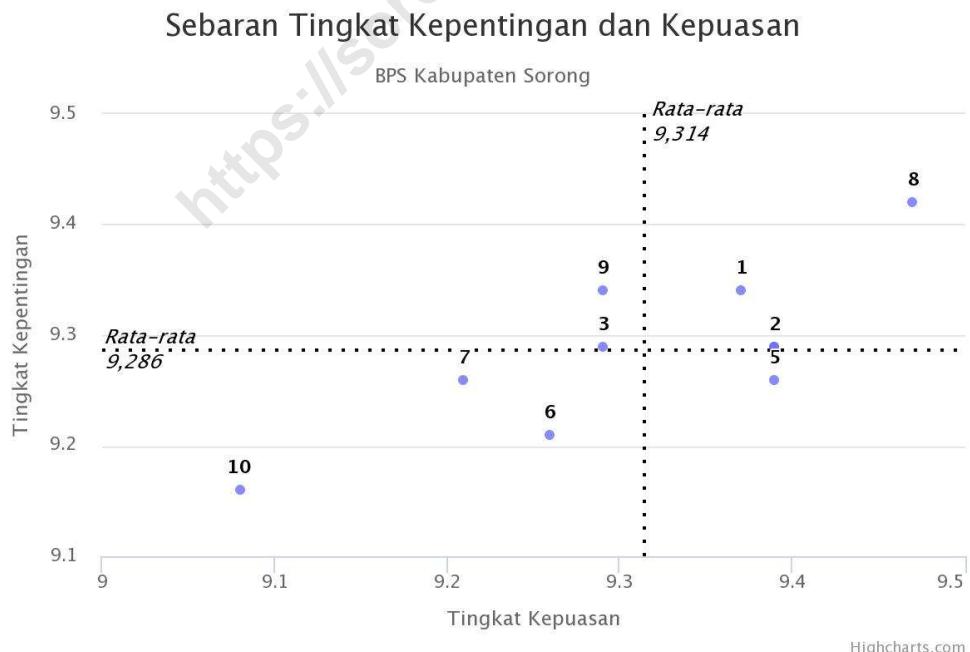
Tabel 3.4. Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Tingkat Kesesuaian Pelayanan Menurut Atribut Pelayanan

Indikator	Kepentingan	Kepuasan	Kesesuaian (%)
Kemudahan Persyaratan Pelayanan	9.34	9.37	100.28
Kemudahan Prosedur	9.29	9.39	101.13
Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan	9.29	9.29	100
Kesesuaian biaya pelayanan	9.29	9.39	101.13
Kesesuaian Produk pelayanan yang diterima	9.26	9.39	101.42
Kenyamanan sarana prasarana	9.21	9.26	100.57
Kemudahan akses data melalui fasilitas utama	9.26	9.21	99.43
Respon Petugas pelayanan	9.42	9.47	100.56

Kejelasan Respon Petugas pelayanan	9.34	9.29	99.44
Keberadaan fasilitas pengaduan mudah diketahui	9.16	9.08	99.14

Tabel 3.2 menjelaskan tingkat kesesuaian antara kepuasan dan kepentingan dari responden menurut atribut pelayanan. Terdapat banyak atribut dengan tingkat kesesuaian lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Kabupaten Sorong sudah memenuhi harapan konsumen. Adapun atribut dengan tingkat kesesuaian paling tinggi ialah “Kesesuaian Produk Pelayanan yang diterima” (101,42%), sedangkan atribut “Keberadaan Fasilitas Pengaduan mudah diketahui” memiliki tingkat kesesuaian paling rendah (99,14%).

Gambar 3.2. Sebaran Tingkat Kepentingan dan Kepuasan



Kuadran A memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan lebih dari rata-rata harapan tetapi nilai kinerja kurang dari rata-rata kinerja. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran A menjadi

prioritas utama perbaikan. Berdasarkan Gambar 3.6, atribut pelayanan yang menjadi prioritas utama perbaikan oleh PST BPS adalah:

1. Kehelasan Informasi Petugas Pelayanan Online
2. Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian

Kuadran B memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan dan nilai kinerja lebih dari rata-rata. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran B sudah dapat memenuhi harapan pengguna sehingga perlu dipertahankan kinerjanya. Berdasarkan Gambar 3.6, atribut pelayanan yang perlu dipertahankan kinerjanya oleh PST BPS adalah:

1. Kemudahan Persyaratan Pelayanan
2. Kemudahan Prosedur
3. Kesesuaian Biaya Pelayanan
4. Respon Petugas Pelayanan

Kuadran C memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan dan nilai kinerja di bawah rata-rata. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran C perlu diperbaiki namun prioritasnya lebih rendah dibandingkan atribut pelayanan yang berada pada kuadran A. Berdasarkan Gambar 3.6, atribut pelayanan yang harus diperbaiki dengan prioritas rendah oleh PST BPS adalah:

1. Kemudahan Fasilitas Pengaduan
2. Kemudahan Akses Data melalui Fasilitas Utama
3. Sarana Prasarana

Kuadran D memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan di bawah rata-rata harapan tetapi kinerja di atas rata-rata kinerja. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran D sudah melebihi harapan konsumen. Berdasarkan Gambar 3.6, atribut pelayanan PST BPS yang termasuk dalam kuadran D adalah Kesesuaian Produk Pelayanan.

3.6. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Terhadap Pelayanan BPS

Tabel 3.5 Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap Pelayanan BPS Menurut Wilayah PST] ,

Kode Daerah	Nama Daerah	IKK
9107	SORONG	93.16

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)/*Customer Satisfaction Index*(CSI) digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPS. Nilai IKK untuk PST BPS Kabupaten Sorong tahun 2022 sebesar 93,16, yang artinya kualitas pelayanan PST BPS Kabupaten Sorong masuk kategori Sangat Baik. Berdasarkan Tabel 3.5, IKK BPS di PST BPS Kabupaten Sorong mengalami penurunan sebesar 0,68 dari 93,84 pada tahun 2021 menjadi 93,16 pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPS Kabupaten Sorong masih perlu meningkatkan pelayanan pada para konsumen data.

ANALISIS PERILAKU ANTI KORUPSI

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI:

Penilaian penerapan perilaku anti korupsi dapat dilihat berdasarkan atribut anti korupsi :

1. tidak ada diskriminasi dalam pelayanan
2. tidak ada penerimaan imbalan di luar ketentuan yang berlaku dalam pelayanan
3. tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.
4. tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.



IPAK

93.75



Bab 4

Analisis Perilaku Anti Korupsi

Pada bab ini diuraikan analisis mengenai persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan PST BPS Kabupaten Sorong. Analisis persepsi anti korupsi meliputi penerapan perilaku anti korupsi dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Unit analisis yang digunakan adalah konsumen dengan satuan orang.

4.1. Gap Analysis Kepuasan Konsumen dalam Penerapan Perilaku Anti Korupsi terhadap Pelayanan BPS

Tabel 4.1. Tingkat Kepuasan, Tingkat Kepentingan, dan Gap menurut Atribut Pelayanan dalam Penerapan Perilaku Anti Korupsi

Indikator	Kepentingan	Kepuasan	Kesesuaian (%)	GAP
Tidak ada Diskriminasi	9.34	9.37	100.28	0.03
Tidak ada penerimaan imbalan di luar ketentuan	9.39	9.29	98.88	-0.11
Tidak ada pungutan liar	9.42	9.47	100.56	0.05
Tidak ada praktik percaloan	9.39	9.37	99.72	-0.03

Tabel 4.1. menjelaskan tingkat kesesuaian antara kepuasan dan kepentingan dari responden menurut atribut Penerapan Perilaku Anti Korupsi. Terdapat dua atribut dengan tingkat kesesuaian lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Kabupaten Sorong sudah memenuhi harapan konsumen. Adapun atribut dengan tingkat kesesuaian paling tinggi adalah "Tidak ada pungutan liar" (100,56%), sedangkan atribut "Tidak ada penerimaan imbalan di luar ketentuan" memiliki tingkat kesesuaian paling rendah (98,88%).

4.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) terhadap Pelayanan BPS

Tabel 4.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Kode Daerah	Nama Daerah	IPAK
9107	SORONG	93.75

Penilaian penerapan perilaku anti korupsi dapat dilihat berdasarkan atribut anti korupsi. Terdapat empat atribut atau unsur anti korupsi yang dicakup, yaitu tidak ada diskriminasi dalam pelayanan, tidak ada penerimaan imbalan di luar ketentuan yang berlaku dalam pelayanan, tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan, dan tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan. Berdasarkan Tabel 4.2, IPAK pelayanan BPS di PST BPS Kabupaten Sorong sebesar 93,75.

ANALISIS KEBUTUHAN DATA

PRESENTASE KEBUTUHAN DATA:



LEVEL DATA
Kabupaten
87.32



PERIODE DATA
Tahunan
92.49



JENIS DATA
Ditemukan
93.43

Bab 5

Analisis Kebutuhan Data

SKD 2022, selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan PST BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data serta mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan oleh BPS. Pada bab ini akan menjabarkan analisis mengenai kebutuhan data dari konsumen. Analisis tersebut meliputi kebutuhan data menurut jenis data, level data, periode data, dan perolehan data.

Terdapat dua pendekatan kewilayahan yang digunakan dalam bab ini, yaitu wilayah PST BPS Kabupaten Sorong dan wilayah penyedia data BPS Kabupaten Sorong. Wilayah PST BPS Kabupaten Sorong digunakan untuk menganalisis jenis, level, dan periode dari data yang dicari oleh konsumen di PST BPS Kabupaten Sorong. Sementara itu, wilayah penyedia data BPS Kabupaten Sorong digunakan untuk menganalisis perolehan konsumen terhadap data yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Sorong. Unit analisis yang digunakan adalah konsumen dengan satuan orang-data.

Orang-data adalah pasangan satu-satu antara setiap konsumen (orang) dengan jenis data yang dibutuhkan (data). Misalnya, seorang pengguna data membutuhkan lima jenis data, maka dihitung lima orang-data.

Ketika mencari data yang dibutuhkan, konsumen bisa membutuhkan lebih dari satu *series* data untuk jenis data yang sama. Sehingga, jika konsumen membutuhkan satu jenis data sebanyak sepuluh tahun, orang tersebut akan dihitung sebagai satu konsumen dan sepuluh orang-data.

5.1. Kebutuhan Data menurut Level Data

Tabel 5.1 Persentase Pencarian Data Menurut Wilayah PST dan Level Data

Kode Daerah	Nama Daerah	Provinsi (%)	Kabupaten/Kota (%)	Kecamatan (%)	Desa/Kelurahan (%)
9107	SORONG	2.35	87.32	6.57	3.76

Berdasarkan hasil SKD 2022, dapat diidentifikasi tingkat penyajian data (level data) yang dibutuhkan oleh konsumen di PST BPS Kabupaten Sorong. Pencarian data terbanyak ada pada level Kabupaten yaitu sebesar 87,32 persen disusul data level kecamatan sebesar 6,57 persen. .

5.2. Kebutuhan Data menurut Periode Data

Tabel 5.2 Persentase Pencarian Data Menurut Wilayah PST dan Periode Data

Kode Daerah	Nama Daerah	10 Tahunan (%)	5 Tahunan (%)	3 Tahunan (%)	Tahunan (%)
9107	SORONG	2.82	0.47	4.23	92.49

Periode data dalam SKD terdiri dari periode data sepuluh tahunan, lima tahunan, tiga tahunan, tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan, mingguan, harian, dan lainnya. Tabel 5.2 menunjukkan bahwa data periode tahunan merupakan data yang paling banyak dicari dengan persentase mencapai 92,49%. Perbedaan persentase yang signifikan terjadi antara periode tahunan dengan periode berikutnya, yaitu tiga tahunan yang memiliki persentase 4,32%.

5.3. Kebutuhan Data menurut Ragam Data

Tabel 5.3 Persentase Pencarian Data Menurut Wilayah PST dan Ragam Data

Kode Daerah	Nama Daerah	Ragam Data	Jumlah Orang Data
9107	SORONG	Sosial	78
		Produksi	34
		Distribusi	13
		NAS	58
		IPDS	3
Total			186

Berdasarkan ragam datanya, data terbanyak yang dicari oleh konsumen di PST Kabupaten Sorong adalah Ragam Data Sosial sebanyak 78 Orang-Data. Selanjutnya adalah data Ragam NAS sebanyak 58 Orang-Data. Sedangkan Ragam Data paling sedikit adalah Ragam Data IPDS sebanyak 3 Orang-Data.

5.4. Kebutuhan Data menurut Jenis Data

Tabel 5.4 Persentase Pencarian Data Menurut Wilayah PST dan Ragam Data

Kode Daerah	Nama Daerah	Diperoleh dan Sesuai (%)	Diperoleh tetapi Tidak Sesuai (%)	Tidak Diperoleh (%)	Belum Diperoleh (%)
9107	SORONG	93.43	6.57	0	0

Dalam pencarian data, konsumen tidak selalu memperoleh data yang dicari. SKD 2022 membagi jenis perolehan data menjadi empat, yaitu diperoleh dan sesuai, diperoleh tapi tidak sesuai, tidak diperoleh, dan belum diperoleh. Jenis perolehan diperoleh dan sesuai memiliki arti bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan konsumen, sedangkan diperoleh tapi tidak sesuai berarti data yang diperoleh hanya memenuhi sebagian kebutuhan konsumen atau menjadi pengganti data yang

sebenarnya dibutuhkan konsumen. Jenis perolehan tidak diperoleh berarti bahwa data yang dicari benar-benar tidak diperoleh. Sementara itu, belum diperoleh memiliki makna bahwa pencarian data belum selesai dilakukan sehingga data yang dibutuhkan belum diperoleh. Analisis berikut menjelaskan jenis perolehan data BPS di Kabupaten Sorong.

Berdasarkan Tabel 5.3, dari seluruh pencarian data, 93,43% memperoleh data sesuai yang dengan kriteria yang dibutuhkan, 6,57% berhasil memperoleh data yang dibutuhkan/dikonsultasikan tetapi hanya memenuhi sebagian kebutuhan konsumen atau menjadi pengganti data yang sebenarnya dibutuhkan.

5.5. Kebutuhan Data menurut Sumber Data

Tabel 5.5 Pencarian Data Menurut Wilayah PST dan Sumber Data

Kode Daerah	Nama Daerah	Publikasi	Data Mikro	Peta	Tabulasi Data	Tabel di Website
9107	SORONG	125	0	0	9	52

Berdasarkan Tabel 5.5. diketahui bahwa sumber data yang paling banyak digunakan oleh konsumen data di BPS Kabupaten Sorong adalah Publikasi sebanyak 125 Orang-Data.

ANALISIS KEPUASAN KUALITAS DATA

IKK* TERHADAP KUALITAS DATA



IKK DATA

91.38

Kualitas data BPS Kabupaten
Sorong masuk kategori

Sangat Baik (skala 100)

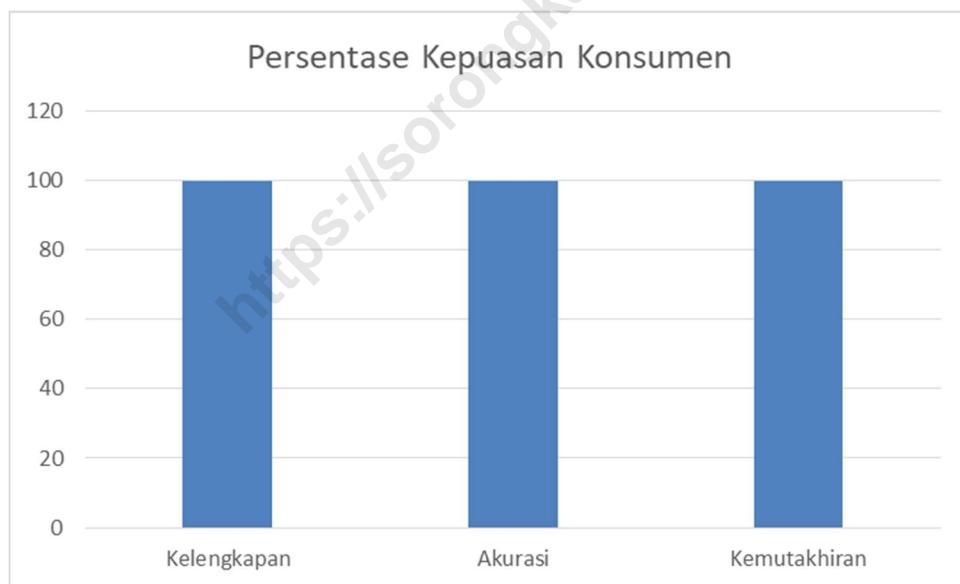
*Indeks Kepuasan Konsumen

Bab 6

Analisis Kepuasan Kualitas Data

Bab ini menjelaskan analisis mengenai kepuasan konsumen terhadap kualitas data dan informasi statistik yang diperoleh dari penyedia data BPS Kabupaten Sorong. Analisis tersebut meliputi kepuasan konsumen terhadap kualitas data secara umum serta menurut dimensi kualitas data. Selain itu, analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap kualitas data BPS. Unit analisis yang digunakan adalah konsumen dengan satuan orang-data.

6.1. Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Data BPS



Gambar 6.1. Grafik Persentase Kepuasan Konsumen

Kepuasan konsumen terhadap data yang diperoleh dari penyedia data BPS Kabupaten Sorong disajikan menurut aspek kualitas data. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat kepuasan konsumen terhadap masing-masing aspek dalam rangka peningkatan kualitas data yang disediakan oleh BPS Kabupaten Sorong. Berdasarkan

Gambar 6.1, pada masing-masing aspek diketahui bahwa kepuasan konsumen mencapai 100 persen.

6.2. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap Kualitas Data BPS

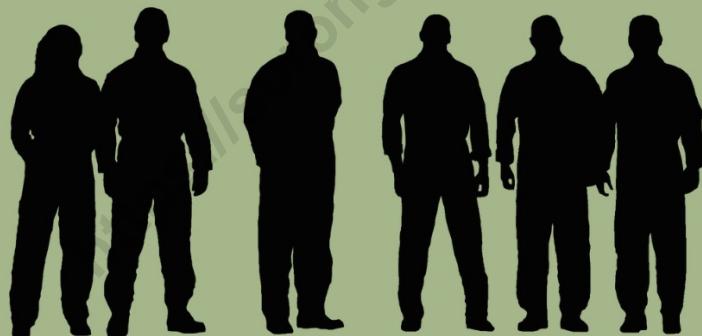
Tabel 6.1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap Kualitas Data BPS Menurut Wilayah Penyedia Data

Kode Daerah	Nama Daerah	IKK DATA
9107	SORONG	91.38

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)/*Customer Satisfaction Index* (CSI) digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat kepuasan konsumen terhadap Kualitas Data BPS dari Penyedia Data BPS Kabupaten Sorong. Nilai IKK untuk PST BPS Kabupaten Sorong tahun 2022 sebesar 91,36, yang artinya kualitas pelayanan PST BPS Kabupaten Sorong masuk kategori Sangat Baik.

PENUTUP

Persentase Kepuasan Konsumen:



99,21

Bab 7

Penutup

7.1. Kesimpulan

Melalui SKD, BPS memperoleh segmentasi pengguna data BPS. Menurut karakteristik pengguna data, mayoritas pengguna data adalah kalangan PNS yang menggunakan data BPS untuk keperluan Perencanaan dan Evaluasi. Sementara menurut jenis layanan akses layanan melalui website adalah yang paling diminati oleh pengguna data. Oleh karena itu, melakukan *updating* data secara berkala pada website menjadi perhatian utama sebagai bentuk pelayanan prima BPS Kabupaten Sorong.

Sebanyak 99,21 persen pengguna mengaku puas dengan pelayanan data BPS Kabupaten Sorong. Dari sisi kualitas, seluruh konsumen puas dengan pelayanan BPS Kabupaten Sorong. Tingkat kepuasan tersebut tersusun dari kepuasan terhadap kelengkapan, akurasi, dan kemutakhiran data. Masing-masing nilai kepuasan setiap indikator adalah sebanyak 100 persen.

Ragam pencairan terbanyak yang dicari oleh konsumen adalah ragam data sosial. Pengguna data yang memperoleh data sesuai kebutuhannya mencapai 93,43 persen.

Kualitas pelayanan BPS Kabupaten Sorong sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) sebesar 93,16 poin.

7.2. Rekomendasi

Pertahankan Kinerja

1. Kemudahan Persyaratan Pelayanan
2. Kemudahan Prosedur
3. Kesesuaian Biaya Pelayanan
4. Kesesuaian Produk Pelayanan
5. Respon Petugas Pelayanan

Rekomendasi yang Diberikan untuk Perbaikan Layanan

Prioritas Utama

1. Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian
2. Kejelasan Informasi Petugas Pelayanan *Online*

Aspek Pelayanan Lain

1. Sarana Prasarana
2. Kemudahan Akses Data melalui Fasilitas Utama
3. Kemudahan Fasilitas Pengaduan

Daftar Pustaka

- Brandt, R.D. 2000. An 'Outside-In' Approach to Determining Customer-Driven Priorities for Improvement and Innovation. Burke White Paper Series, Vol. 2, Issue 2, pp. 1-8.
- Latu, TM & Everett, AM. 2000. Review of Satisfaction Research and measurement Approaches. Science & Research Internal Report 183. New Zealand: Departement of Conservation.
- Martilla, JA, & James, JC. 1977. Importance–Performance Analysis. Journal of Marketing, 41(1), 13–17.
- Martinez, CL. 2003. Evaluation Report: Tools Cluster Networking Meeting #1. Arizona: CenterPoint Institute Inc.
- Parasuraman, A. Valerie. 2001. Delivering Quality Service. New York: The Free Press.

LAMPIRAN



<https://Sorongkab.bps.go.id>

Lampiran 1. Realisasi Jumlah Responden menurut Wilayah PST dan Metode Pengumpulan Data

Satker PST (1)	Jumlah Responden (2)	Metode Pengumpulan Data			
		Manual (3)	PST (4)	Email (5)	Link (6)
Kabupaten Sorong	38	32			6

Metadata Indikator

Konsep	: Realisasi Jumlah Responden menurut Wilayah PST dan Metode Pengumpulan Data.
Definisi	: Banyaknya konsumen yang menjadi responden SKD di wilayah PST BPS tertentu menurut metode pengumpulan data yang digunakan. Secara garis besar, metode pengumpulan data dibedakan menjadi 2 yaitu manual dan <i>online</i> , dimana untuk metode <i>online</i> dibedakan menjadi 3: <ol style="list-style-type: none">1) PST; yaitu untuk responden yang datang langsung melakukan pengisian mandiri pada <i>device</i> atau komputer yang terdapat di masing-masing PST.2) <i>Email</i>; yaitu responden yang mengisi survei secara mandiri melalui tautan pengisian yang dikirimkan melalui <i>email</i>.3) <i>Link</i>; yaitu responden yang mengisi survei secara mandiri melalui <i>link</i> yang didapatkan dari publik seperti pada <i>website</i>, aplikasi layanan, dll.
Klasifikasi Penyajian	: 1. Wilayah PST BPS 2. Metode Pengumpulan Data
Ukuran	: Jumlah
Satuan	: Orang
Rumus Penghitungan	: $Y = \sum_{i=1}^4 x_i$ Dengan: $Y = \text{Total jumlah responden}$ $x_i = \text{Jumlah responden menurut metode pengumpulan data, dimana } i = 1 \text{ (manual), 2 (email), 3 (PST), dan 4 (link)}$
Interpretasi	: Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah konsumen dengan metode pengumpulan data tersebut di wilayah PST BPS tertentu.
Manfaat	: Mendapatkan gambaran segmentasi konsumen menurut metode pengumpulan data yang digunakan.

Lampiran 2. Persentase Konsumen menurut Wilayah PST dan Jenis Kelamin

Satker PST (1)	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)
Kabupaten Sorong	60.53	39.47

RAHASIA



VKD22

Dasar hukum:

1. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
3. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman SKM Unit Pelayanan Publik
4. Peraturan Kepala BPS No. 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKD di Lingkungan BPS

SURVEI KEBUTUHAN DATA TAHUN 2022

Keterangan Pencacahan (*diisi oleh petugas*)

Pencacah	Nama :	Nomor Responden : Pemeriksa	Nama :
.....	Tanggal :	Kode Wilayah	Nomor Urut

Blok I. Keterangan Responden

1 Nama :

9 Nama instansi/institusi :

2 Tahun lahir :

10 Pemanfaatan utama hasil kunjungan : Tugas Sekolah/Tugas Kuliah

3 *E-mail* :

Komersial - 3
Penelitian - 4

4 Nomor *handphone* * :
**untuk keperluan survei ini*

5 Jenis kelamin : Laki-laki
Perempuan

- 1
- 2

11 Jenis layanan yang digunakan : Perpustakaan - 1
Boleh pilih lebih dari satu jawaban Pembelian Publikasi BPS - 2

6 Pendidikan tertinggi yang : ≤ SLTA/Sederajat
ditamatkan D1/D2/D3 - 1
- 2

- Akses produk statistik pada Website BPS - 8
- Konsultasi Statistik - 16

	S2	- 4
	S3	- 5

12 Fasilitas yang digunakan untuk : Datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) - 1

7 Pekerjaan utama : Pelajar/Mahasiswa - 1
Pilih salah satu jawaban Peneliti/Dosen - 2

Boleh pilih lebih dari satu jawaban

- 4 Website BPS (bps.go.id) / AllStats BPS
- 8 Surat/Email

PNS, TNI, POLRI	- 3
Pegawai BUMN/BUMD	- 4
Pegawai Swasta	- 5

Ripikasri Chai (Whaleshipp, Telegram, Giaatos, arr.) - 18
Lainnya (.....) - 32

Lainnya (.....) - 7

15 Apakah data BPS digunakan sebagai . Ta
rujukan utama? Tidak

6 Kategori Instansi/Institusi .	Lembaga Negara	- 1
<i>Pilih salah satu jawaban</i>	Kementerian & Lembaga Pemerintah	- 2
	Pemerintah Daerah	- 3
	Lembaga Internasional	- 4

14 Apakah pernah melakukan pengaduan terkait Pelayanan Statistik Terpadu (PST)? : Ya - 1
Tidak - 2

Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS

Menurut pendapat Saudara, bagaimana **tingkat kepentingan pelayanan** dan **tingkat kepuasan** Saudara terhadap **pelayanan** berikut?

Lingkari angka yang Saudara pilih sesuai skala berikut:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sangat tidak penting /tidak puas

Sangat penting /puas

No	Kondisi Pelayanan	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan																				
1	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
2	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
3	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
4	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
5	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
6	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
7	Data BPS mudah diakses melalui fasilitas utama yang digunakan: (sesuai Blok 1 Rincian 12).	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
8	Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan <i>online</i> merespon dengan baik.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
9	Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan <i>online</i> mampu memberikan informasi yang jelas.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
10	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui. (contoh: Kotak saran dan pengaduan, website https://pengaduan.bps.go.id , e-mail bpsq@bps.go.id)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
11	<i>Ditanyakan jika responden pernah melakukan pengaduan (B1R14 berkode 1),</i> Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
12	Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
13	Tidak ada penerimaan imbalan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pelayanan.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
14	Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
15	Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														

Blok III. Kebutuhan Data

Diisi jika jenis layanan yang digunakan selain rekomendasi kegiatan statistik (Blok I Rincian 11 berisi salah satu kode 1, 2, 4, 8, 16)

Tuliskan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan/dikonsultasikan dari BPS serta tingkat kepuasan terhadap masing-masing data tersebut.

1) Kode level data kolom (4)

1. Nasional 3. Kabupaten/kota 5. Desa/kelurahan
2. Provinsi 4. Kecamatan 6. Individu
7. Lainnya (sebutkan)

3) Definisi kolom (11) - (13)

- Kelengkapan : Data lengkap terhadap aspek cakupan wilayah atau tahun data.
 - Akurasi : Data mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya atau sesuai fenomena yang terjadi pada periode referensi
 - Kemutahiran : Data terbaru yang dapat menggambarkan kondisi/fenomena yang terjadi pada periode referensi (*up to date*)

2) Kode periode data kolom (5)

- Kode periode data kelereng (3)

1. Sepuluh tahunan	4. Tahunan	7. Bulanan	10. Lainnya (sebutkan)
2. Lima tahunan	5. Semesteran	8. Mingguan	
3. Tiga tahunan	6. Triwulanan	9. Harian	

Blok IV. Catatan

Tuliskan kritik dan saran terhadap produk dan layanan data/informasi statistik yang disediakan oleh BPS

https://sorongkab.bps.go.id

D A T A

M E N C E R D A S K A N B A N G S A



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SORONG

Jalan Osok KM 19, Distrik Aimas, Kab
Sorong

Homepage:

<https://sorongkab.bps.go.id>

<https://tambrauwkab.bps.go.id/>

Email: bps9107@bps.go.id